

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA BUMDES BANTAL ASEMBAGUS SITUBONDO

Achmad dan Edi Mulyanto, Ahmadi

amamat75@gmail.com, mulyanto_edi@gmail.com, Ahmadidewi88@gmail.com

Universitas Ibrahimy

ABSTRAK

Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah sistem yang perlu dikembangkan oleh setiap organisasi, agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penerapan sistem pengendalian dengan menciptakan lingkungan pengendalian, melakukan aktifitas pengendalian, pengelolaan risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan kegiatan secara berkesinambungan merupakan serangkaian aktifitas yang sangat berguna untuk menjaga dan meningkatkan aset usaha.

BUMDes Bantal Mandiri adalah badan usaha milik desa Bantal Asembagus Situbondo, yang mengembangkan usaha di bidang jasa, pengembangan obyek wisata, peternakan, pengelolaan sumber air, dan pertanian. Dalam menjalankan aktifitas operasional usaha, BUMDes Bantal telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan pengawas, komisaris, direktur, ketua unit usaha, bendahara, dan beberapa karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di BUMDes Bantal, diperoleh kesimpulan bahwa BUMDes Bantal telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai konsep komponen COSO. Hal ini dibuktikan dari adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar pengurus BUMDes, adanya otorisasi dari setiap aktifitas bisnis, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik. Kelemahan yang masih dijumpai yaitu belum adanya dokumen standar operasional prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Keyword: *Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Dana, BUMDES*

PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dengan memperkuat daerah dan desa adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional dan tertuang pada NAWACITA ketiga tahun 2014-2019. Hal ini diperkuat

dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitas, supervisi dan pendampingan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif (Anom surya putra, 2015). Sehingga kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi memiliki amanah mendampingi desa dalam melaksanakan program pemerintah, guna mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri dan demokrasi (Anom surya putra, 2015). Untuk itu, pembangunan desa diharapkan mampu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan dapat mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah.

Salah satu pendekatan yang diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat desa, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa yang dikelola pemerintah desa bersama masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa (V. Wiratna Sujarweni, 2019).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar, berlandaskan pada prinsip efisiensi dan efektifitas (V. Wiratna Sujarweni, 2019).

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa serta agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuannya, dalam pengelolaan BUMDes harus dijalankan berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara professional dan mandiri (V. Wiratna Sujarweni, 2019).

Desa Bantal kecamatan Asembagus Situbondo merupakan salah satu desa yang memiliki badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Sebagaimana tertera dalam undang-undang tujuan berdirinya BUMDes desa Bantal Asembagus Situbondo adalah untuk mensejahterakan rakyat dan membantu terhadap pendapatan asli desa (PAD) sesuai dengan potensi yang ada. Adapun jenis usaha yang dijalankan BUMDes diantaranya adalah usaha salon, sewa peralatan pernikahan, obyek wisata, peternakan, sumber air, dan pertanian.

Semua jenis usaha yang dijalankan adalah untuk membantu segala kebutuhan masyarakat agar masyarakat mudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meski demikian bukan berarti BUMDes tidak mengalami masalah dalam menjalankan usahanya. Ada beberapa kendala yang dihadapi BUMDes dalam mengembangkan dan memajukan usaha-usaha, diantaranya adalah masalah pengendalian dalam pengelolaan masing-masing usaha yang masih kurang efektif.

Dari beberapa jenis usaha yang dijalankan BUMDes Bantal, hanya beberapa unit usaha yang berjalan cukup lancar, seperti obyek wisata dan sewa peralatan perkawinan. Namun dalam aktivitasnya masih kurang optimal dalam mencapai target yang telah ditentukan (Sekretaris Desa, *Wawancara*, Situbondo, 15 November 2019). Kendalanya adalah kurang totalitas dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan karyawan dan pengelola usaha (manajer) BUMDes rata-rata lebih fokus pada pekerjaan rutin utamanya. Dalam artian, memiliki dua pekerjaan (*double job*), seperti bertani, PNS, dan sebagainya. Kendala lainnya yaitu tidak tetapnya gaji yang diberikan, sehingga karyawan tidak maksimal dalam mengelola BUMDes (Sekretaris Desa, *Wawancara*, Situbondo, 15 November 2019). Selain faktor tersebut, kendala berikutnya yaitu dana modal operasional BUMDes.

Dari hasil studi pendahuluan di atas, peneliti bermaksud untuk menganalisis lebih mendalam terhadap sistem pengendalian internal pengelolaan dana BUMDes Bantal Asembagus Situbondo.

KAJIAN TEORI

A. Sistem Pengendalian Internal

Secara bahasa, sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Valery G. Kumat, 2011). Menurut James A Hall, sistem adalah kelompok dari dua komponen atau lebih atau sub sistem yang saling berhubungan dan berfungsi dengan tujuan yang sama (James A. Hall, 2007).

Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010). Pengendalian internal (*internal control*) merupakan rencana organisasi atau metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Krismiaji, 2010). Sistem pengendalian internal didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Amin Widjaja Tunggal, 2010).

COSO (*Comitte Of Sponsoring Organization Of Treadway Commision*) mengidentifikasi lima komponen untuk mencapai tujuan pengendalian internal, yaitu; (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) aktifitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan.

Lingkungan pengendalian diartikan sebagai sekumpulan standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar pelaksanaan internal organisasi, termasuk didalamnya standar perilaku yang diharapkan oleh manajemen (COSO, 2013). Penilaian risiko merupakan kegiatan mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu untuk memastikan tindakan manajemen dalam menangani risiko. Sedangkan pemantauan adalah proses penilaian mutu pengendalian secara berkelanjutan atau periodik untuk menentukan bahwa pengendalian telah beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.

B. Pengelolaan Dana

Secara umum, pengelolaan dana disebut juga dengan manajemen keuangan, yang berarti suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi. Didalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya, serta upaya untuk menggunakan dan mengalokasikan dana secara efisien untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Asnaini, 2012) .

Manajemen keuangan (*financial management*) adalah keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana suatu perusahaan serta mengalokasikan dana tersebut (Bambang Riyanto, 1995) . Keseluruhan aktivitas yang dimaksud adalah; (Herispon, 2018) (a) *Planning of funds* yaitu merencanakan keperluan dana; (b) *Obtaining of funds* yaitu usaha memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya yang paling ringan; dan (c) *Allocation of funds* yaitu mengelola dana yang diperoleh.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah suatu badan usaha yang dikelola pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, dan mampu menambah wawasan masyarakat desa. Dengan kata lain, BUMDes bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa (V. Wiratna Sujarweni, 2019) .

Pendirian suatu BUMDes dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa, meningkatkan sumber pendapatan asli desa, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan lain yang sah, menumbuh kembangkan usaha sektor informal agar dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa, dan meningkatkan kreatifitas berwirausaha masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pengendalian internal merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan menggolongkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem organisasi. Sehingga seluruh aktivitas perusahaan dapat berjalan sesuai perencanaan manajemen dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pengelolaan dana BUMDes Bantal Mandiri, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan komponen dasar terpenting bagi komponen pengendalian lainnya. Bagaimana sikap ketua BUMDes merupakan cerminan lingkungan pengendalian sebuah organisasi. Integritas dan nilai-nilai etis telah diterapkan oleh BUMDes Bantal Asembagus sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Meski tidak semua aturan dan prosedur dilaksanakan secara maksimal, tetapi sejauh ini tidak ada pegawai yang melakukan pelanggaran berat terhadap aturan yang berakibat fatal terhadap BUMDes Bantal. Apabila dijumpai suatu pelanggaran, maka yang dilakukan pengurus BUMDes adalah menegur secara lisan. Selanjutnya dilakukan teguran tertulis apabila tidak ada perkembangan. Dan terakhir akan diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan. Dalam penempatan posisi jabatan, BUMDes Bantal Mandiri memperhatikan keahlian yang dimiliki pegawai. Pemantauan yang ada di BUMDes Bantal dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali oleh dewan pengawas dan juga komisaris untuk memeriksa kinerja usaha BUMDes Bantal.

Berdasar teori COSO, bahwa lingkungan pengendalian internal adalah sekumpulan standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar bagi pelaksanaan organisasi. Dimana dewan direksi dan manajemen menetapkan pentingnya sistem pengendalian internal, termasuk didalamnya standar perilaku. Pengendalian internal merupakan suatu kesadaran sikap dari seluruh manajemen dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. Lingkungan pengendalian ini menjadi fondasi dari semua komponen pengendalian lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Ada 6 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, diantaranya adalah integritas

dan nilai-nilai etis, komitmen kepada kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya manajemen, struktur organisasi, kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia. Maka dengan demikian, dari aspek lingkungan pengendalian, operasional tata kelola organisasi BUMDes sudah sesuai dengan konsep komponen COSO.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko terhadap pengelolaan dana BUMDes Bantal Mandiri terletak pada peran dan tugas bendahara serta ketua unit masing-masing usaha, yang sudah mampu melakukan pencatatan, penggolongan, pengolahan, penyimpanan dan pengarsipan administrasi keuangan. Kelemahan yang ada saat ini adalah upaya yang dilakukan oleh ketua unit masih kurang maksimal untuk mendapatkan sumber keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Permasalahan risiko tersebut harus mendapat penanganan yang tepat untuk tercapainya tujuan sebagaimana konsep COSO. Titik lemah yang menjadi risiko harus dikelola oleh BUMDes sehingga tidak sampai merugikan BUMDes Bantal untuk mencapai tujuannya.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang diterapkan oleh BUMDes Bantal yaitu dengan melakukan pemisahan tugas dan wewenang berdasarkan jabatan. Ketua BUMDes Bantal melakukan pemeriksaan secara independen dan mengotorisasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh pegawai BUMDes, serta rutin melakukan evaluasi terhadap kesalahan prosedur yang mungkin terjadi dalam aktivitasnya. Dalam pemeliharaan dokumen usaha dan keuangan, BUMDes Bantal telah melakukan penyimpanan secara baik dan dijadikan bukti dalam laporan yang dilakukan setiap tahunnya.

Dalam konsep COSO, bahwa aktivitas pengendalian adalah suatu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang telah diambil oleh manajemen untuk menangani risiko telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian umum dibagi menjadi 5 jenis, diantaranya adalah pemisahan tugas yang memadai, otorisasi transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta pemeriksaan kinerja secara independen. Sehingga dengan demikian, implementasi aktivitas pengendalian yang dilakukan BUMDes Bantal Asembagus telah sesuai dengan teori COSO.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi akuntansi BUMDes Bantal dikelola dengan menggunakan aplikasi terbaru yang diberlakukan secara nasional sejak bulan Juni 2020, sehingga ketua BUMDes Bantal dapat memantau langsung terhadap aktivitas transaksi yang terjadi pada masing-masing unit usaha secara realtime. Komunikasi terhadap alur keuangan BUMDes Bantal selama ini belum memiliki alur yang ditetapkan dalam aturan atau SOP. Namun dalam pelaksanaannya, alur keuangan BUMDes disesuaikan dengan *job deskriptor* yang ada. Sehingga bendahara BUMDes melakukan komunikasi langsung dengan dewan pengawas dan komisariss untuk meminta persetujuan terhadap kebutuhan BUMDes yang berada di luar Anggaran dan Belanja.

Dalam konsep COSO, bahwa informasi yang relevan dan berkualitas sangat diperlukan untuk melakukan pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya organisasi. Komunikasi adalah *continual* atau bersifat terus menerus dalam menyediakan, berbagi, dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Sehingga, alur pengelolaan keuangan BUMDes Bantal perlu dilengkapi dengan aturan yang memadai (berupa SOP keuangan) untuk menjadi acuan dalam proses pengelolaan pengeluaran dan pemasukan BUMDes. Namun aplikasi keuangan yang digunakan BUMDes sudah cukup baik untuk menyediakan informasi secara terus menerus bagi para pemangku kepentingan.

5. Pemantauan

BUMDes Bantal Mandiri memiliki dewan pengawas dan komisariss sebagai pemantau terhadap seluruh aktivitas kegiatan BUMDes. Selain itu ketua BUMDes juga berperan sebagai pemantau terhadap jalannya kegiatan dan keuangan BUMDes. Evaluasi oleh Ketua dilaksanakan setiap satu bulan satu kali, untuk mengetahui sejauh mana keuangan yang dikeluarkan masing-masing unit usaha dan bagaimana pendapatan (laba) yang diperoleh.

Hal ini sejalan dengan konsep COSO yang mengatakan bahwa pemantauan adalah proses penilaian mutu pengendalian internal yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan, untuk menentukan apakah operasional perusahaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dengan demikian, pemantauan yang dilakukan BUMDes secara periodik tersebut sudah sesuai dengan teori COSO.

6. Evaluasi Pengelolaan Dana BUMDes

Sumber dana BUMDes terdiri dari dana penyertaan pemerintah dan masyarakat dengan perbandingan minimal 51% modal pemerintah desa dan maksimal 49% modal masyarakat. Sumber modal yang dikelola oleh BUMDes Bantal adalah modal yang bersumber dari pemerintah melalui dana PK2 dan APBDes/DD. Modal yang ada digunakan oleh BUMDes sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB). Ketergantungan pada Desa dan tidak adanya sumber dana dari pihak ke-3. membuat BUMDes Bantal kesulitan dalam mengelola unit usaha. Selain itu BUMDes Bantal kekurangan SDM yang kompeten dalam mengelola keuangan yang ada agar bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengurus BUMDes Bantal Asembagus perlu melakukan terobosan-terobosan pendanaan, seperti: hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, atau dengan membangun kerjasama, atau membuka usaha tabungan atau simpanan dana masyarakat.

KESIMPULAN

1. Ditinjau dari aspek komponen COSO, bahwa sistem pengendalian internal BUMDes Bantal Asembagus sudah berjalan dengan baik, hanya pada komponen informasi dan komunikasi yang masih belum ditopang dengan *standar operational prosedure* (SOP) keuangan. Selain itu, BUMDes perlu secara rutin melaksanakan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi karyawannya.
2. Pengelolaan dana BUMDes Bantal Asembagus sudah direncanakan dengan baik, meski keuntungan yang diperoleh masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pengurus BUMDes. Kelemahannya adalah faktor sumber modal operasional yang mengandalkan anggaran dari APBDes. Sehingga BUMDes perlu meningkatkan kerjasama permodalan dengan pihak swasta dan/atau lembaga sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal. (2010). *Teori dan Praktek Auditing*. Jakarta : Harvarindo.
- Anom surya putra. (2015). *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa, (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, .*
- Asnaini. (2012). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Teras .
- Bambang Riyanto. (1995). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework : Executive Summary*. Durham: North Carolina.
- Herispon. (2018). *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau.
- James A. Hall. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- V. Wiratna Sujarweni. (2019). *Akuntansi BUMDes*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Valery G. Kummat. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Veithzal Rivai. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.